

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alfarizi, M. Agung. (2021). *Evaluasi Kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Diploma thesis, IPDN Jatinangor.
- Azizah, Hasna dkk. (2021). Tinjauan Atas Langkah Pemerintah Dalam Mempertahankan Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Terkait APBN. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(2), 1-9
- DJPK. (2018). Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah. *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: DJPK
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 995-1013
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Faq PMK 43/2020. Diakses tanggal 15 Juni 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/15053/faq-pmk-43-2020.pdf>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. Buletin Teknis No. 4 tentang *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Daerah*. Jakarta
- Mulyana, B. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: PKN STAN Press
- Noviyanti, M.A. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Dan Pengalaman Terhadap Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung). Bandung: *Repository Unpas*
- Sugiri, D. (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 58-68.
- Wibawa, M. A., & Wibowo, P. (2021). Pengelolaan Anggaran Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPPBC TMP A Marunda Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnalku*, 1(2), 124-140.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Pemantauan dan Evaluasi atas Realokasi dan Refocusing APBD untuk Penanganan COVID-19 di Daerah. Diakses tanggal 18 Desember 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, tentang *Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19*. 2020. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, tentang *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. 2013. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang *Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. (2020). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang *Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*. (2020). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Walikota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang *Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batu*. (2013). Batu: Sekretaris Daerah Kota Batu.

Peraturan Walikota Batu Nomor 29 Tahun 2020 Tentang *Petunjuk Pemberian, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tak Tersuga untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Nonalam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019*. (2020). Batu: Sekretaris Daerah Kota Batu.